

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji mengenai klarifikasi perbuatan dan penegakan hukum secara administratif, perdata, maupun pidana terkait Badan Usaha yang tidak mengikuti aturan BPJS Ketenagakerjaan sesuai prosedur/aturan yang telah ditetapkan. Tesis ini menggunakan tipe yuridis normative. Pengaturan mengenai aturan BPJS Ketenagakerjaan dengan perbuatan Badan Usaha sangat terkait erat demi mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyejahterahkan rakyatnya. Sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Bangsa Indonesia. Seorang pekerja merupakan aspek terpenting dalam pembangunan sebuah Bangsa. Maka, kesejahteraan pekerja mejadi tanggungjawab dari Negara Indonesia.

**Kata Kunci : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,
Pekerja, Badan Usaha, Pemerintah.**

ABSTRACT

This thesis examines the clarification of actions and law enforcement in an administrative, civil and criminal manner related to Business Entities that do not follow the rules of the BPJS Employment according to established procedures / rules. This thesis uses a normative juridical type. Regulations regarding the regulation of BPJS Employment with the actions of Business Entities are closely related to the realization of the ideals of the Indonesian Nation to prosper the people. So that Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency was issued as a form of Government responsibility in realizing the goals of the Indonesian Nation. A worker is the most important aspect in the development of a Nation. So, the welfare of workers becomes the responsibility of the State of Indonesia.

Keywords: Labor Insurance Agency (BPJS), Workers, Business Entity, Government.